

Penyuap Bupati Musi Banyuasin Dituntut Hukuman 3 Tahun Penjara

PALEMBANG (IM) - Direktur Selaras Simpati Nusantara, Suhandy, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa mengatakan, terdakwa terbukti bersalah menyuap Bupati Musi Banyuasin nonaktif, Dodi Reza Alex.

Sidang yang dilakukan secara virtual, Jaksa Penuntut Umum KPK, Ibnugroho menyatakan, terdakwa Suhandy terbukti melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

"Menuntut terdakwa Suhandy dengan hukuman 3 tahun penjara," ujar Ibnugroho saat membacakan tuntutan, Kamis (17/2).

Selain menuntut hukuman penjara 3 tahun, Jaksa juga menuntut hukuman denda sebesar Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Dalampertimbangannya, JPU mengatakan, hal-hal yang memberatkan, terdakwa

tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang dianggap meringankan, terdakwa dinilai kooperatif selama persidangan.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa Suhandy yang dihadirkan melalui sambungan layar virtual mengatakan, bakal menyampaikan nota pledoi atau pembelaan. Nantinya, pledoi itu akan dibacakan secara langsung oleh Suhandy sendiri secara virtual dan melalui kuasa hukumnya dihadapan hakim.

Ditemui setelah persidangan, Kuasa Hukum Suhandy, Titis Rachmawati menilai, tuntutan hukuman 3 tahun terhadap kliennya tersebut dinilai cukup tinggi.

"Bila dibanding dengan kasus lain, tuntutan pada klien kami ini cukup tinggi. Tapi kami menghormati penilaian dari Jaksa Penuntut Umum KPK yang sudah disampaikan," ujarnya. ■ **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANT



KEMENTERIAN ATR/BPN RAKER DENGAN KOMISI II DPR Menteri ATR/BPN Sofyan Djailil (tengah), Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra (kedua kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2). Rapat tersebut diantaranya membahas evaluasi penyelesaian 751 kasus konflik pertanahan yang ditangani Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2021.

Pemilihan Komisioner KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Dinilai Tak Transparan

Pemilihan Komisioner KPU dan Bawaslu sangat bernuansa politik dan tidak transparan. Publik berhak tahu latar belakang terpilihnya 12 nama anggota KPU dan Bawaslu tersebut.

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menilai, proses pemilihan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang diselenggarakan DPR tidak transparan.

Hadar mempertanyakan indikator yang digunakan Komisi II DPR dalam menentukan peringkat para calon komisioner sebagai dasar pe-

milihan. "Proses tidak dilakukan dengan cukup transparan, khususnya dalam pengambilan keputusan. Kemudian tidak didasari pada ukuran-ukuran yang objektif, karena kita tidak melihat apa angka atau nilai yang digunakan mereka dalam membuat urutan tersebut," kata Hadar saat dihubungi, Kamis (17/2).

Hadar berpendapat, pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu yang digelar DPR selama tiga hari, sangat bernuansa

politik. Ia mengatakan, publik berhak tahu latar belakang di balik keputusan Komisi II DPR menentukan 12 nama anggota KPU dan Bawaslu terpilih.

"Mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat tidak apa-apa, itu prosedur yang baik juga. Tapi dalam bermusyawarah kita perlu tahu kenapa nama-nama itu yang dipilih. Apa dasarnya, nama lain tidak dipilih apa alasannya? Mungkin ada perdebatan fraksi-fraksi dan mengapa akhirnya mereka sepakat. Itu seharusnya kita berhak tahu," ujarnya.

Hadar menduga pemilihan para komisioner KPU dan Bawaslu ini tidak terlepas dari kesepakatan politik. Ia khawatir kesepakatan ini berpotensi mengganggu kerja para

komisioner terpilih.

"Karena mereka sudah dipilih melalui proses yang sangat bernuansa politik yang bisa jadi membuat mereka akan terikat," ucapnya.

Dia berharap para komisioner bisa melepaskan ikatan politik yang terjadi dalam proses pemilihan tersebut. Para komisioner harus dapat bekerja dengan berprinsip pada kemandirian penyelenggara pemilu dan integritas.

Selain itu, kata Hadar, para komisioner mesti bekerja secara profesional dan imparial.

"Ini penting, bukan hanya sekadar melaksanakan tugas seperti apa yang diatur. Saya khawatir bayang-bayang kesepakatan politik yang terjadi kemarin akan bisa menyeter kerja-kerja mereka," katanya.

Komisi II DPR telah memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 lewat uji kelayakan dan kepatutan yang digelar sejak Senin (14/2) hingga Rabu (16/2).

Tujuh anggota KPU terpilih yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Muhammad

Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara itu, lima anggota Bawaslu terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jeffer Malonga.

Pemilihan dilakukan melalui aklamasi dalam sidang pleno Komisi II DPR. Sebelum pleno digelar, Komisi II melakukan rapat internal tertutup untuk menentukan peringkat calon anggota KPU dan Bawaslu. Peringkat tersebut kemudian menjadi dasar Komisi II menyepakati anggota KPU dan Bawaslu terpilih.

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, pengurutan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu itu berdasarkan pertimbangan objektif. Selain itu, Komisi II juga mempertimbangkan integritas, kreativitas, hingga kesehatan fisik dan mental para calon.

Namun, Doli juga mengaku, terpilihnya 12 anggota KPU dan Bawaslu itu tak lepas dari pertimbangan politik. ■ **han**



TARGET PENURUNAN KEMISKINAN EKSTREM

Warga beraktivitas di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis (17/2). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada tahun 2023 mendatang.

Tiga Jenderal NII Jalani Sidang Perdana Kasus Makar di PN Garut

GARUT (IM) - Tiga jenderal Negara Islam Indonesia (NII) jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Garut, hari ini, Kamis (17/2). Ketiga jenderal NII itu didakwa melakukan makar.

Ketiganya, Sodikin, Jajang dan Ujer, tiba di pengadilan dengan mengenakan pakaian serba putih dan rompi berwarna kuning. Mereka tampak dituntun petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut untuk dibawa ke ruangan sidang PN Garut.

Sebelum dilimpahkan ke Kejari Garut, jajaran Polres Garut menjerat ketiganya dengan sejumlah pelanggaran

berbeda seperti UU ITE, UU Makar, hingga UU terkait Lambang Negara dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun.

Polisi, menyita sejumlah barang bukti termasuk bendera NII dari ketiganya. Sebelumnya, Kapolres Garut AKBP Wiradhanto Wicaksono mengatakan, pihaknya akan membongkar sisa-sisa jaringan NII di Garut.

"Berbicara struktur organisasinya, ini yang masih jadi pendalaman pihak kepolisian," ucap Wiradhanto Wicaksono saat diwawancarai Senin 14 Februari 2022, lalu. ■ **han**

Sekda Kota Bekasi Diperiksa KPK terkait Kasus Korupsi Rahmat Effendi

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Reny Hendrawati, Kamis (17/2). Reny diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi (RE).

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk penyelidikan tersangka RE," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (17/2).

Selain Reny, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ar Ryasakha, Widodo Indriyanto, serta dua Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Syarif dan Sau Mulya. Keterangan mereka untuk melengkapi berkas penyelidikan Rahmat Effendi.

KPK sebelumnya telah menetapkan sembilan orang tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi alias Bang Pepen.

Kemudian, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin, Lurah Kati Sari bernama Mulyadi, Camat Jatisampurna bernama Wahyudin, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi bernama Jumhana Lutfi.

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni,

Ali Amril menjabat Direktur PT MAM Energindo, Lai Bui Min dari pihak swasta, Suryadi merupakan Direktur Kota Bintang Rayatri, serta Camat Rawalumbu bernama Saifudin.

Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus 'Sumbangan Masjid'. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara. O-han

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. ■ **han**

Peluncuran Mars dan Hymne KPK Ciptaan Istri Firli Bahuri Menuai Kritik

JAKARTA (IM) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemendikham) menyerahkan hak cipta lagu mars dan hymne kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses ini sebagai pengesahan hak intelektual atas kedua lagu tersebut untuk ditetapi menjadi bagian dari identitas kelembagaan.

Penyerahan ini disampaikan oleh Menkumham Yasonna Laoly kepada Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam acara Launching Lagu Mars dan Hymne KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/2).

"Lagu mars dan hymne ini, kini hak ciptanya adalah milik KPK. Sehingga harapannya, seluruh insan KPK juga punya rasa memiliki yang utuh dengan mengimplementasikan pesan-pesan dalam lagu tersebut. Menumbuhkan semangat dalam bekerja dan berkarya untuk Indonesia melalui pemberantasan korupsi," kata Yasonna dalam keterangannya, Kamis (17/2).

Lagu mars dan hymne KPK yang digubah oleh Ardina Safitri ini mengandung pesan dan makna, untuk mengajak insan KPK terus berbakti kepada negeri demi mewujudkan Indonesia yang jaya, Indonesia yang bebas dari

korupsi.

Ardina menyampaikan rasa bangganya, melalui lagu mars dan hymne ini bisa ikut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.

"Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apapun, sesederhana apapun, demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi," kata Dina.

Firli Bahuri mengatakan, keberadaan lagu mars dan hymne KPK ini akan semakin menambah kebanggaan setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya dan selalu mengingatkan bahwa insan KPK bangga melayani bangsa, setiap saat bekerja dengan penuh semangat karena didorong oleh kecintaan pada Ibu Pertiwi.

"Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia," kata Firli.

Menuai Kritik

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengaku heran dengan tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang memilih lagu ciptaan istrinya,

Ardina Safitri, sebagai mars dan hymne KPK. Ia menilai, ada konflik kepentingan di balik pemilihan lagu tersebut.

Menurut Praswad, kerja-kerja pemberantasan korupsi semestinya tidak memerlukan sebuah mars dan hymne.

"Terus terang saya kehabisan kata-kata atas tindakan ketua KPK memilih lagu ciptaan istrinya menjadi hymne KPK," ujar Praswad kepada wartawan, Kamis (17/2).

"KPK bukan perusahaan keluarga, dan pemberantasan korupsi tidak perlu hymne," katanya.

Praswad berpendapat, pembuatan mars dan hymne KPK sangat ironis jika melihat kinerja lembaga antirasuah yang tidak juga terlihat bisa menuntaskan sejumlah persoalan. Mantan penyidik KPK itu menilai, hymne pemberantasan korupsi sejatinya adalah jerit suara rakyat yang berharap keadilan atas kerja-kerja komisari antikorupsi tersebut.

"Andai kita mau mendengar sedikit lebih jernih menggunakan hati nurani, tidak perlu sulit-sulit menciptakan lagu, karena hymne pemberantasan korupsi yang sejati ada di dalam jerit tangis derita rakyat korban bansos yang sampai saat ini tidak dituntaskan oleh KPK," tutur Praswad. ■ **han**

FOTO: ANT



LAYANAN PEMBUATAN PASPOR

Petugas mewawancarai pemohon pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok, Jawa Barat, Kamis (17/2). Dirjen Imigrasi memperluas layanan paspor elektronik di 52 Kantor Imigrasi yang dapat dipilih oleh pemohon melalui aplikasi pendaftaran secara online sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Komisi VI DPR Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia

JAKARTA (IM) - Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia sebagai bentuk dukungan politik agar maskapai Garuda Indonesia dapat tetap bertahan.

"Kita ingin Garuda Indonesia sebagai national flag carrier kita untuk bisa tetap mengudara, untuk bisa terbang, sebagai maskapai kebanggaan nasional kita," kata Ketua Panitia Penyelamatan Garuda Indonesia, Martin Manurung, dikutip dari siaran pers, Rabu (17/2).

Martin mengatakan, pembentukan panja merupakan tindak lanjut dari tiga rapat kerja yang sudah dilakukan Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN dan jajaran direksi Garuda Indonesia.

Politikus Partai Nasdem itu menuturkan, panja ini nantinya tidak hanya mendalami perma-

salahan manajemen di tubuh Garuda, tetapi juga mendalami opsi-opsi penyelamatan yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Panja akan memberikan rekomendasi yang diputuskan dalam raker terkait dengan opsi-opsi yang tersedia untuk penyelamatan Garuda," kata Martin.

Sebelumnya Panja Penyelamatan Garuda telah melakukan rapat perdana bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiapatra pada Rabu kemarin. Rapat digelar secara tertutup.

Menteri BUMN Erick Thohir menyambut positif pembentukan panja penyelamatan Garuda Indonesia. Ia bilang, hal itu merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut. ■ **mei**



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 17 A
 ☎ : (0734) 421194 FAX : (0734) 421194 Kode Pos 31311
 Website : https://www.pn-muaraenim.go.id
 Email : pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

RELAAS PANGGILAN SIDANG No. 2/Pdt.P/2022/PN Mre

Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 saya Jimmy Oktavianus, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Enim, atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata No. 2/Pdt.P/2022/PN Mre

TELAH MEMANGGIL

Yudia Utama Zaini, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Oktober 1961, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Komplek Rumah Tumbuh RT.03 RW.08 Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan.

Namun pada saat ini Yudia Utama Zaini tidak lagi dapat diketahui keberadaannya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia;

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di:

Pengadilan Negeri : Muara Enim;
 Jalan : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim
 Hari / Tanggal : Kamis / 12 Mei 2022;
 Pukul : 09.00 WIB;

Untuk pemeriksaan perkara permohonan yang diajukan oleh Welly Hartoni, SH, Tasminia, SH, Abdi Persada Daim, SH, Agus Setiawan, SH, dan Rifi Antoni, SH, semuanya adalah Advokat-Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBHS" bertindak untuk dan atas nama Adia Tursina Binti Yudia Utama Zaini sebagai Pemohon I dan Naima Larasati Binti Yudia Utama Zaini sebagai Pemohon II;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan saya laksanakan melalui media agar ia datang menghadap pada persidangan tersebut diatas;

Jurusita,

 Jimmy Oktavianus, A.Md.